

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RUSTAM, S.KM., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

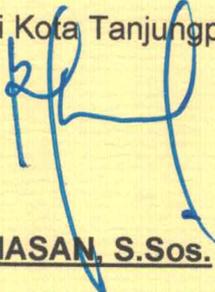
Nama : HASAN, S.Sos.
Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang


RUSTAM, S.KM., M.Si.
NIP. 19670401 199101 1 001

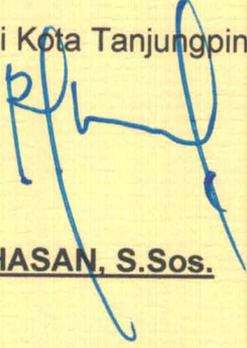
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TANJUNGPINANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase perempuan dalam pengambilan keputusan	Persen	44,23	44,43	44,63
		Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	Persen	36,67	36,84	37,07
		Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	Persen	27,12	27,32	27,52
2.	Terwujudnya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Rasio	39,10	53,77	41,00
		Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,66	66,66	68,60
4.	Mempercepat kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna) yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Persen	75,00	80,00	80,00
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	74,25	-	75,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	34,73	24,00	25,00
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	Persen	98,00	100,00	100,00
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	39,10	53,77	41,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.164.263.045	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 235.170.400	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 830.404.000	APBD/ DAK
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 388.098.175	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 181.975.000	APBD
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 243.844.000	APBD/ DAK
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 50.000.000	APBD
8	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 730.865.000	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Tanjungpinang


RUSTAM, S.KM., M.Si.
NIP. 19670401 199101 1 001